



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Yos Sudarso Nomor 02, Jekan Raya, Palangka Raya – Kalimantan Tengah 73112

Telepon : (0536)3242931, Faksimile : (0536)3242931

Email : bpprd@palangkaraya.go.id Website : <https://bpprd.palangkaraya.go.id>

Palangka Raya, 16 Januari 2025

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika

Statistik dan Persandian

c.q. Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Publik

di

PALANGKA RAYA

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 400.14.3/0057/Sekt/BPPRD/1/2025

No.	Naskah/Barang yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Penyampaian Data PPID Tahun 2025 di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya	3 (tiga) berkas	Disampaikan sebagaimana dimaksud, sebagai bahan lebih lanjut, terima kasih



KEPALA BADAN
Mewakili,

CAHAYA KUMALA SARI, S.E.,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 197005011999022001



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Jalan Yos Sudarso No. 02 telp/fax (0536) 3231057 email : bprpd@palangkaraya.go.id
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA

NOMOR : 100.3.3.6/0017/Sekt/BPPRD/I/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
8. Peraturan Walikota palangka Raya Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Kota Palangka Raya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
- EDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang meliputi :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c. Informasi terbuka lain yang diminta Pemohon Informasi Publik.
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; dan
5. Melakukan pemuktahiran informasi.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 06 Januari 2025

KEPALA BADAN,



EMI ABRIYANI, S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196710051994122002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 100.3.3.6/0017/Sekt/BPPRD/I/2025
TANGGAL 06 Januari 2025
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PPID Pelaksana pada BPPRD Kota Palangka Raya**

1	Atasan PPID	EMI ABRIYANI, S.E.,M.Si
2	PPID	CAHAYA KUMALA SARI, S.E.,M.Si DEWI YANIKA ANGGRAENI, S.Psi SYAFIRA SEKAR WIDHYA
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	DAHLIA, S,E DESIRA ALBERTINE, S.P.,M.E
4	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	ANDREW VINCENT PASARIBU, S.E., M.Ec.Dev
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	EDDY SUNARTO, S.H., M.M ANDREW VINCENT PASARIBU, S.E., M.Ec.Dev


KEPALA BADAN,
EMI ABRIYANI, S.E.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196710051994122002

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PPIID PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN 2025**

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Sat ker yang menguasai informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab ab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
Informasi tentang Profil Badan Publik							
1.	Kedudukan domisili dan Alamat lengkap	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dokumen PDF	-
2.	Struktur Organisasi terbaru	BPPRD	Sekretaris Badan	Organisasi Selda Kota Palangka Raya	Palangka Raya	Dokumen PDF	-
3.	Tugas dan Fungsi Satuan Kerja	BPPRD	Kepala Badan	Pj. Walikota Palangka Raya	Palangka Raya	Dokumen PDF	-
4.	Profil Singkat Pejabat	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dokumen PDF	-
5.	SDM yang dimiliki (data statistik kepegawaian berdasarkan tingkat Pendidikan, dsb)	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dokumen PDF	-
6.	LHKPN Pimpinan	BPPRD	Kepala Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dokumen PDF	-
7.	LHKASN	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dokumen PDF	-
8.	Informasi kegiatan Badan Publik misal di BPPRD : PPIID Kota Palangka Raya (bimtek, money, sosialisasi, goes to campus, pendampingan)	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dokumen PDF	-

No	Ringkasan isi Informasi	Pejabat/Unit/Sat ker yang menguasai Informasi	Pejabat/Satker yang menguasai Informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitaan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
Informasi program/kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik							
9.	Nama Program dan Kegiatan	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dok PDF DPA /RKA	-
10.	Penganggung Jawab pelaksana program	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dok PDF SK PPTK	-
11.	Target dan Capaian Program Kegiatan	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dok Lap MONEV	-
12.	Jadwal Pelaksanaan Program / Kegiatan	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dok. Rencana Aksi	-
13.	Nilai Anggaran Kegiatan Per Program	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dok PDF DPA /RKA	-
14.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	BPPRD	Sekretaris Badan dan Kepala Bidang	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dokumen PDF	-
15.	Perjanjian Kinerja (PK)	BPPRD	Sekretaris	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dokumen PDF	-
16.	Rencana Strategis (Renstra)	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dok PDF RENSTRA	-
17.	Rencana Kerja (Renja)	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dokumen PDF	-
Rencana Kinerja Yang Telah Dilaksanakan							
18.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan(LKJIP)	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dokumen PDF	-
19.	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dokumen PDF	-
20.	Laporan PPID	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2025	Dokumen PDF	-
21.	Informasi yang berkaitan dengan hak hak Masyarakat	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2025	Dokumen PDF	-

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Sat ker yang menguasai informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab ab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
Ringkasan Laporan Keuangan							
22.	LRA	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dokumen PDF	-
23.	DPA	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dokumen PDF	-
24.	RKA	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dokumen PDF	-
25.	Neraca	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dokumen PDF	-
26.	Laporan Arus Kas dan CALK	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dokumen PDF	-
27.	Daftar Aset dan Investasi	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dokumen PDF	-
Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa							
28.	Rencana Pengadaan Barang Jasa (Tahap Perencanaan)	-	-	-	-	-	-
29.	Pengumuman Proses Pengadaan (Tahap Pemilihan)	-	-	-	-	-	-
30.	Laporan Pengadaan Barang Jasa (Tahap Pelaksanaan)	-	-	-	-	-	-
Informasi tentang hak dan tatacara pengaduan penyalahgunaan wewenang							
31.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Satker	-	-	-	-	-	-

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Sat ker yang menguasai informasi	Pejabat/Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau pemerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan							
32.	Daftar Rancangan Peraturan	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	PPID Pelaksana	Kepala Badan	2024	File	Selama Masih Berlaku
33.	Daftar Peraturan dan Keputusan yang telah ditetapkan	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	PPID Pelaksana	Kepala Badan	2024	File	Selama Masih Berlaku
34.	Daftar Standar Operasional Pelayanan (SOP) Satker	Sekretariat, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pelayanan, Bidang Penagihan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian	PPID Pelaksana	Kepala Badan	2024	File	Selama Masih Berlaku

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA - MERTA

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbihan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
1.	Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat	-	-	-	-	-	-
2.	Penegakan Protokol Kesehatan di satker	-	-	-	-	-	-

C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SETIAP SAAT

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbihan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
1.	Daftar Informasi Publik (DIP)	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dokumen PDF	-
2.	Informasi tentang Peraturan, Keputusan/Kebijakan termasuk didalamnya juga Perjanjian Kerjasama (MoU)	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	PPID Pelaksana	Kepala Badan	2024	File	Selama Masih Berlaku
3.	Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian, dan keuangan	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dokumen PDF	-

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Pejabat/Unit/ Satker yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
	<input type="checkbox"/> Profil lengkap pimpinan & pegawai yang meliputi nama, riwayat karier/posisi, riwayat pendidikan, penghargaan yang pernah diterima <input type="checkbox"/> Daftar LHKASN Data Statistik Sektoral	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dokumen PDF	-
4.	Surat Menyurat Satker	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dok. PDF	-
5.	Surat – surat perjanjian dengan pihak ketiga <input type="checkbox"/> Daftar Kontrak Pengadaan Barang Jasa Daftar Perjanjian Kerja Sama	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dok, PDF	-
6.	Daftar Aset dan Inventaris Barang	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya	Dok, PDF	-
7.	Renstra dan Renja	BPPRD	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Palangka Raya 2024	Dok PDF RENSTRA dan RENUA	-
8.	Agenda Kerja Pimpinan	BPPRD	Sekretaris Pimpinan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada kegiatan	Dokumen PDF	-

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Univ Sater yang menguasai informasi	Pejabat/Univ Sater yang menguasai informasi	Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi	Waktu dan tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip
9.	Informasi tentang Kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan	Eselon III dan IV pada masing-masing Bidang BPPRD	Kepala Badan	Bidang Pelayanan	Setiap ada kegiatan	Media Sosial berupa Instagram	-
10.	Jumlah, Jenis dan gambaran umum pelanggaran	-	-	-	-	-	-
	<input type="checkbox"/> Gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya Gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya	-	-	-	-	-	-
11.	Daftar Hasil Penelitian	-	-	-	-	-	-
12.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pimpinan Badan Publik	-	-	-	-	-	-
13.	Informasi lainnya	-	-	-	-	-	-

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPIID PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 TAHUN 2025

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1	2	3	4	5	6
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH					
1	Dokumen pengelolaan kepegawaian : Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensun dan Administrasi Kepegawaian	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h.	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
2	Daftar Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i.	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
3	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Sampai diketahui pemangannya	Bertentangan dengan prinsip- prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip- prinsip pengadaan dan etika pengadaan
4	Database Objek Pajak dan Retribusi	UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, pasal 40 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf j	Sampai ada perintah dari penegak hukum yang berwenang	Dapat Menyebaban penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi atau mengamankan database objek pajak dan retribusi
5	Dokumen Penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan. Dapat menghambat proses penegakan hukum. Dapat mengungkap rahasia pribadi ASN	Dapat menjamin objektivitas penilaian/ evaluasi penawaran
6	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, pasal 7 huruf a, h dan i	Sampai dengan ada persetujuan dari ASN yang bersangkutan	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan. Dapat menghambat proses penegakan hukum. Dapat mengungkap rahasia pribadi ASN	Membantu kelancaran proses penegakan hukum. Mengamankan proses penyusunan kebijakan. Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia.